

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan luas 5,2 juta km^2 dimana 1,9 juta km^2 daratan dan 3,3 juta km^2 lautan (Buku Statistik Pekerjaan Umum, 2013). Luas wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan merupakan potensi besar yang saat ini sedang dikembangkan pemerintahan Indonesia namun, dengan begitu luas lautan di Indonesia, ini juga dapat menjadi hambatan tersendiri terhadap proses pembangunan. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah pulau yang mencapai 17.504 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Indonesia saat ini dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan wilayah yang matang agar pembangunan wilayah-wilayah di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Glasson menyatakan bahwa, *“The regional can be viewed as an intermediate level between national and local”* (Glasson, 1992). Pendapat ini memberikan makna bahwa, wilayah adalah *subnational areas*, yaitu suatu ruang yang terletak di antara wilayah nasional dan wilayah perkotaan. Posisi wilayah yang terletak diantara wilayah nasional dan perkotaan mengindikasikan adanya berbagai organisasi keruangan yang terbentuk, berkembang dan bersifat dinamis akibat adanya imbal daya atau pengaruh keruangan dari wilayah perkotaan menuju ke wilayah nasional begitupun sebaliknya.

Fokus pembangunan nasional Indonesia saat ini adalah wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah 3T. 3T merupakan singkatan dari daerah tertinggal, terbelakang, dan terdepan. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan jumlah wilayah kabupaten dengan kategori tertinggal yang tinggi yaitu, 20 kabupaten. Berikut tabel 1 memperlihatkan daftar wilayah 3T dengan status tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1.1. Daftar Wilayah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Dikategorikan Sebagai Wilayah Tertinggal

No.	Nama Kabupaten	Status
1.	Kabupaten Alor	Tertinggal
2.	Kabupaten Belu	Tertinggal
3.	Kabupaten Ende	Tertinggal
4.	Kabupaten Flores Timur	Tertinggal
5.	Kabupaten Kupang	Tertinggal
6.	Kabupaten Lembata	Tertinggal
7.	Kabupaten Manggarai	Tertinggal
8.	Kabupaten Ngada	Tertinggal
9.	Kabupaten Sikka	Tertinggal
10.	Kabupaten Sumba Barat	Tertinggal
11.	Kabupaten Sumba Timur	Tertinggal
12.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Tertinggal
13.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Tertinggal
14.	Kabupaten Rote Ndao	Tertinggal
15.	Kabupaten Manggarai Barat	Tertinggal
16.	Kabupaten Nagakeo	Tertinggal
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Tertinggal
18.	Kabupaten Sumba Tengah	Tertinggal
19.	Kabupaten Manggarai Timur	Tertinggal
20.	Kabupaten Sabu Raijua	Tertinggal

Sumber: Bappenas (2014). Daftar 183 Daerah Tertinggal dalam: <http://kawasan.bappenas.go.id/>

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) mendefinisikan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Seluruh karakteristik wilayah tertinggal merupakan sebuah permasalahan dalam pembangunan wilayah. Aspek perencanaan wilayah memiliki peranan penting dalam permasalahan ini. Karakteristik wilayah dengan letak geografis yang relatif terpencil, kekurangan sumber daya alam, dan rawan bencana alam sangat berkaitan erat dengan kajian perencanaan wilayah.

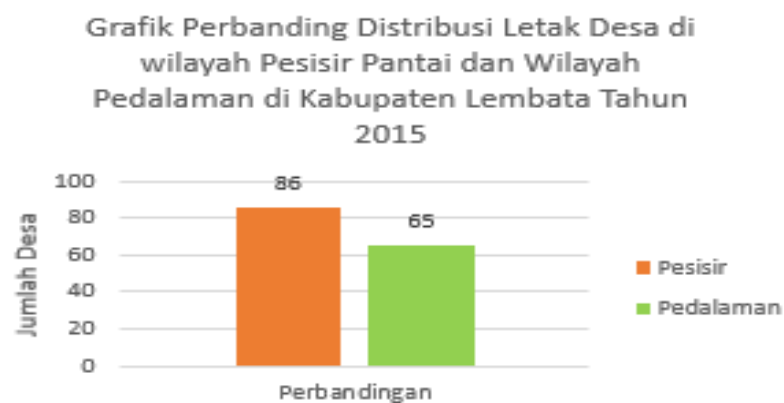
Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang memiliki ciri khas unik secara perwilayahan karena secara administrasi Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang memiliki ciri khas sebagai kabupaten pulau atau seluruh wilayah otoritas administrasinya berada di satu pulau yaitu, Pulau Lembata. Ciri khas wilayah seperti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji struktur spasial wilayah Kabupaten Lembata karena unik. Struktur spasial di Kabupaten Lembata dengan ciri khas sebagai kabupaten Pulau tentunya akan sangat berbeda dengan struktur spasial kabupaten yang bukan Pulau.

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata berdasarkan hasil Podes Tahun 2011 sebanyak 115.213 jiwa yang tergabung dalam 31.085 keluarga. Terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 2% dibandingkan tahun 2009, dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 54.122 jiwa dan perempuan 61.091 jiwa dan sex rasionya 88,59. Jumlah penduduk miskin sebanyak 63.413 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 91 jiwa/km² (PSMB UPN dan BPBD Kabupaten Lembata, 2015).

Topografi Kabupaten Lembata terdiri dari wilayah pesisir, berbukit dan bergunung-gunung dengan puncak tertinggi berada pada 1.319 meter di atas permukaan air laut. Kemiringan lahan bervariasi antara 15 % sampai dengan 40 %. Sebagian mayoritas desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 (delapan puluh enam) desa dan kelurahan dan 65 (enam

puluh lima) desa berada di dataran tinggi. Dari keadaan topografi ini dapat digambarkan bahwa 117 desa berada di perbukitan atau pegunungan serta 27 desa dan 7 kelurahan berada di daerah dataran rendah (PSMB UPN dan BPBD Kabupaten Lembata, 2015). Berikut grafik perbandingan distribusi letak desa di wilayah pesisir dan wilayah pedalaman di Kabupaten Lembata berdasarkan topografi.

gambar 1.1. Perbandingan Distribusi Desa di Wilayah Pesisir Pantai dan Wilayah Pedalaman di Kabupaten Lembata Tahun 2015



Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana PSMB UPN dan BPBD Kabupaten Lembata, 2015

Gambar 1.1 mengartikan bahwa, terdapat 86 desa yang secara topografi terletak di wilayah pesisir dan 65 desa lainnya terletak di wilayah pedalaman. Ini merupakan sebuah fenomena yang menarik karena mayoritas letak desa di Kabupaten Lembata terletak di wilayah pesisir pantai dan sebagian kecil lainnya terletak di wilayah pedalaman. Fenomena ini juga menarik peneliti untuk menjadikan Kabupaten Lembata sebagai wilayah penelitian. Karakteristik topografi serta kaitannya dengan sebaran letak desa tentunya sangat mempengaruhi kebijakan strategi pengembangan wilayah dalam kajian perencanaan wilayah.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Lembata paham akan pentingnya hidup sehat, yang dapat dilihat dari indikator persentasi sumber air minum dari sumur yang terlindungi, fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri dan

tempat akhir pembuangan tinja di lubang tanah paling besar dibandingkan dengan yang lainnya (PSMB UPN dan BPBD Kabupaten Lembata, 2015).

Secara morfologi wilayah ini dapat dibagi menjadi dua satuan, yaitu daerah pegunungan dan daerah pedataran. Daerah pegunungan dicirikan oleh puncak gunungapi yang sebagian masih aktif, diantaranya Ile Boleng (1659 m), Ile Lewotolo (1450 m) dan Gunung Topaki (1365 m). Daerah pedataran hanya terdapat di beberapa bagian pulau, diantaranya di daerah Lewoleba yang ditutupi oleh batu gamping koral, secara umum dilandasi oleh batuan gunungapi tua (PSMB UPN dan BPBD Kabupaten Lembata, 2015).

Karakteristik distribusi letak desa yang membentuk sebuah regionalisasi wilayah berdasarkan kondisi topografi dimana wilayah pulau ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu, wilayah pesisir pantai dan wilayah pedalaman menjadikan wilayah ini unik. Kajian struktur ruang wilayah di Kabupaten Lembata tentunya dalam perumusan kebijakan sangat berkaitan erat dengan kondisi karakteristik fisik morfologi pulau, sosial ekonomi, dan berbagai aspek lainnya.

Wilayah 3T dengan kategori sebagai wilayah tertinggal dan karakteristik perwilayahan yang unik merupakan latar belakang mengapa peneliti memilih Kabupaten Lembata sebagai wilayah penelitiannya. Kajian struktur spasial wilayah dan penentuan pusat pelayanan wilayah secara *intra-regional* di Kabupaten Lembata sangat diperlukan agar proses pengambilan kebijakan terkait perencanaan wilayah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Struktur spasial di wilayah Kabupaten Lembata dapat diketahui dengan cara menganalisis hierarki wilayah dan interaksi wilayah. Analisis hierarki wilayah dan interaksi wilayah dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan pusat pelayanan wilayah secara *intra-regional* di Kabupaten Lembata. Analisis hierarki wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis skelogram sedangkan analisis interaksi wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis gravitasi. Penelitian ini ingin menentukan dan merumuskan pusat kegiatan wilayah berbasis struktur spasial dengan menilai hierarki wilayah dan kekuatan interaksi wilayah secara deskriptif.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Hierarki Wilayah dan Interaksi Wilayah di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Perumusan Perwilayahan Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah Berbasis Struktur Spasial di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Hierarki Wilayah dan Interaksi Wilayah di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Merumuskan Perwilayahan Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah Berbasis Struktur Spasial di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai rekomendasi yang bisa digunakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata dalam pengambilan kebijakan Terkait Pembangunan Daerah dan Perencanaan Wilayah.
2. Memberikan informasi berupa pengetahuan tentang hierarki wilayah, interaksi wilayah dan pusat pelayanan di wilayah 3T, khususnya, wilayah Kabupaten Lembata.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di jenjang S1.
4. Sebagai Bahan Referensi Pembelajaran Teknik Analisis Perencanaan Wilayah.
5. Sebagai Sumbangsai Gagasan Ilmiah dan Karya Ilmiah Untuk Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1. Pengertian dan Konsep Wilayah

1. Pengertian Wilayah

Wilayah adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun aktifitas sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain disekitarnya (Choirul Amin dan Muhammad Musiyam, 2017). Yang dimaksud wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Glasson (1992) menjelaskan bahwa, dalam memaknai wilayah terdapat dua perbedaan secara substantif, kedua perbedaan tersebut adalah pandangan yang berangkat dari subyek dan obyek. Pandangan subyektif menempatkan wilayah sebagai alat atau cara untuk membatasi, menyederhanakan ide, suatu model yang dapat digunakan untuk mempelajari dunia sedangkan pandangan obyektif meletakkan wilayah sebagai suatu objek atau batasan itu sendiri entitas nyata yang dapat diidentifikasi, lebih dalam dan dapat dipetakan. Penelitian ini menggunakan pandangan obyektif untuk memahami wilayah. Objek yang dimaksud adalah hierarki wilayah dan interaksi wilayah di Kabupaten Lembata provinsi nusa Tenggara Timur.

2. Karakteristik Wilayah

Terdapat tiga klasifikasi wilayah jika menggunakan pandangan obyektif (Setyono Jawoto, (2007). Berikut klasifikasi wilayah jika menggunakan pandangan obyektif:

1. Wilayah formal

Wilayah formal atau homogen merupakan wilayah yang diklasifikasi berdasarkan kesamaan atau keseragaman kriteria tertentu dalam suatu area.

2. Wilayah Fungsional

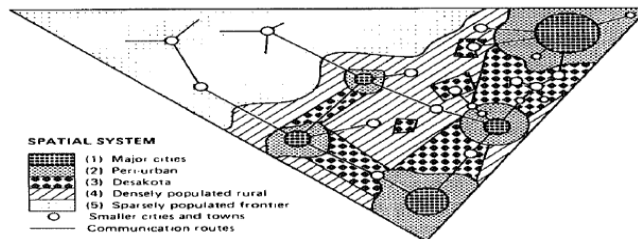
Wilayah fungsional merupakan suatu area yang menggambarkan keterikatan dan keterhubungan antar bagian.

3. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan adalah tipe klasifikasi ketiga yang mengakomodasi wilayah formal dan wilayah fungsional atau mengkombinasi antara keduanya, wilayah formal maupun fungsional.

Penelitian ini memandang objek kajian berangkat dari pandangan obyektif dimana objek kajian dapat identifikasi dan dapat dipetakan. Objek kajian tersebut adalah struktur ruang di Kabupaten Lembata. Struktur ruang di Indonesia menurut McGee (1992) tidak hanya dikotomis yakni, adanya kota dan desa, melainkan juga dicirikan oleh keberadaan beberapa kawasan campuran yang menggambarkan adanya batas-batas yang kabur (*blurring boundaries*) antara desa dan kota. Kawasan ini tersebar di sepanjang koridor jalan arteri yang menghubungkan kota satu dengan yang lainnya, dan oleh McGee (1992) disebut sebagai kawasan desakota. Tipikal struktur wilayah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.5.1.

Gambar 1.5.1. Tipikal Struktur Wilayah di Indonesia



Sumber: Setyono Jawoto, (2007). "Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota". Buku Ajar.

Fakultas Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro

3. Wilayah Sebagai Ruang

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalitas (UU No.26 tentang penataan ruang, 2007). Definisi ini menjelaskan bahwa wilayah merupakan satu kesatuan ruang (*spatial*). Dalam satu kesatuan ruang itu terdapat banyak elemen dan komponen yang membentuk ruang itu sendiri serta proses keterkaitan antar elemen dan komponen-komponen di dalam ruang itu sendiri. Ruang sering diartikan dengan spasial atau keruangan. Penelitian ini memandang objek kajian secara keruangan dan menitik beratkan objek kajian pada aspek keruangan atau spasial. Penelitian ini menganalisis wilayah dengan pendekatan spasial secara *intra-regional*. Unit wilayah yang dikaji adalah wilayah kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lembata. Sebaran geografis kecamatan-kecamatan yang terdapat di dalam ruang wilayah Kabupaten Lembata tentunya memiliki kedudukan secara hierarki dan hubungan secara fungsional.

6. Komponen Perkembangan Wilayah

Setyono, Jawoto (2013) menjelaskan bahwa, terdapat dua pendekatan utama untuk menjelaskan bagaimana wilayah berkembang. Pendekatan pertama mengatakan bahwa wilayah berkembang karena adanya

keseimbangan antar faktor yang memicu perkembangan wilayah (*balanced growth*). Pendekatan lain mengatakan bahwa, perkembangan wilayah merupakan hasil dari adanya ketidakseimbangan antar faktor (*unbalanced growth*). William Alonso (1990) menjelaskan bahwa, wilayah berkembang atau tidak berkembang akan dipengaruhi oleh lima elemen pokok yaitu,

1. Tahapan perkembangan
2. Ketimpangan sosial
3. Ketimpangan wilayah
4. Konsentrasi geografis
5. Transisi demografis

Komponen-komponen yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah dinamika spasial yang terjadi di dalam suatu wilayah. Wilayah dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu unit keruangan atau spasial.

1.5.1.2. Teori Terkait Hierarki Wilayah dan Interaksi Wilayah

1. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Francois Perroux pada tahun 1990 mengemukakan teorinya *pole de croissance*. Dalam teorinya itu Perroux menekankan bahwa, pertumbuhan tidak muncul di setiap tempat secara simultan dan serentak. Pertumbuhan itu harus diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan. Dalam kaitannya dengan struktur ruang teori *growth pole* memiliki sumbangsi terkait struktur ruang. Teori *growth pole* ini membuktikan bahwa, wilayah sejatinya memiliki sruktur yang berjenjang dan bersifat hierarkis.

2. *Central Place Theory*

Choirul Amin dan Muhammad Musiyam (2017) menyatakan bahwa, teori tempat sentral adalah teori geografis yang berusaha menjelaskan jumlah, ukuran dan lokasi permukiman penduduk dalam sistem perkotaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, *central place theory* sendiri secara tidak langsung membuktikan bahwa wilayah sejatinya memiliki kedudukan secara hierarkis.

Permukiman berfungsi sebagai *central place* (tempat pusat) yang menyediakan layanan kepada daerah sekitarnya (*Christaller, 1933*). Pernyataan Christaller ini menjelaskan bahwa, pusat permukiman merupakan tempat atau lokasi pusat pelayanan yang melayani wilayah sekitarnya. Teori *central place* yang dikemukakan Christaller ini memiliki penekanan pada aspek hubungan wilayah secara fungsional dimana, pusat permukiman memegang peranan penting untuk melayani wilayah sekitarnya. Hubungan pusat permukiman dengan wilayah sekitarnya dapat diartikan sebagai interaksi wilayah.

3. Fasilitas Sosial

Menurut kamus besar bahasa indonesia fasilitas adalah sarana yang menunjang atau melancarkan suatu usaha atau kegiatan. Permendagri no 1 tahun 1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial menjelaskan bahwa fasilitas sosial yaitu, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi: fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman umum.

Fasilitas sosial memegang peranan penting dan dapat menjadi indikator untuk mengetahui struktur ruang wilayah. Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang diperlukan masyarakat dan sekaligus faktor utama dalam memperlancar proses pembangunan wilayah. Ketersediaan fasilitas sosial dapat menentukan perkembangan suatu wilayah. Semakin banyak ketersediaan fasilitas sosial suatu wilayah maka semakin tinggi jenjang kedudukan wilayah tersebut dalam struktur ruang wilayah dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit ketersediaan fasilitas sosial maka semakin rendah kedudukan wilayah tersebut dalam struktur ruang wilayah.

4. Teori Interaksi Spasial

Hukum gerak *Newton* memberikan dasar analogis untuk pemodelan interaksi spasial dalam sistem geografis. Setelah fisika klasik didirikan pada akhir abad ke-17, ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa, kekuatan yang

terjadi di dunia sosial dapat dimodelkan dengan cara yang sama seperti di dunia fisik. Sejumlah upaya awal untuk generalisasi semacam itu dilakukan, namun aplikasi yang paling eksplisit dibuat oleh *Ravenstain* pada tahun 1888. Sebagai bagian dari komisi royal untuk penduduk di Inggris, dia berpendapat bahwa arus migrasi dari berbagai daerah dapat ditunjukkan dengan menggunakan model gravitasi. yang terletak di dasar hukum gerak *Newton* yang kedua.

Selama paruh pertama abad ke-20, hipotesis gravitasi untuk berbagai masalah pergerakan dan interaksi dalam sistem manusia menjadi populer. Yang terpenting di antara ini adalah adaptasi model gravitasi *Reilly* untuk memungkinkan batas wilayah pedalaman ditarik antara pusat perbelanjaan yang berbeda berdasarkan titik-titik dimana arus belanja ke pusat-pusat yang bersaing sama. Model gravitasi yang diadaptasi oleh *Reilly* merupakan model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Lembata.

Model interaksi spasial yang paling kuat didasarkan pada model gravitasi, yang mengusulkan bahwa jumlah interaksi antara dua lokasi, yang disebut titik asal dan tujuan, masing-masing, sebanding dengan produk dari massa tujuan dan berbanding terbalik dengan beberapa ukuran pemisahan. Ini adalah analogi dari hukum gerak *Newton* yang kedua, yang menghitung kekuatan antara dua tubuh karena produk massa mereka dibagi dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Model gravitasi seperti ini biasanya digunakan untuk memprediksi aktivitas di berbagai lokasi asal dan tujuan melalui konsep potensi.

Interaksi atau imbal daya adalah merupakan satu proses saling mempengaruhi antara dua hal (Yunus Hadi, 2010). Dalam kaitannya dengan ruang, proses interaksi diartikan sebagai proses imbal daya saling mempengaruhi antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Ruang dalam konteks penelitian ini adalah wilayah. Suatu wilayah pada dasarnya tidak mampu berdiri sendiri dan berkembang melainkan membutuhkan wilayah sekitarnya dalam konteks kewilayahan, diartikan sebagai interpendensi antara wilayah. Interpendensi ini terjadi akibat perbedaan karakteristik geografis dan sumber daya alam pada masing-masing wilayah. Dalam konteks penelitian ini interpendensi diartikan sebagai ketergantungan antar-wilayah yang disebabkan oleh perbedaan kelengkapan fasilitas sosial.

5. **Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Spasial**

a. *Regional Complementary*

Regional complementary merupakan adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, artinya terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lembata tentunya memiliki perbedaan dalam segi ketersediaan fasilitas sosial. Perbedaan ketersediaan fasilitas sosial merupakan salah satu contoh *regional complementary*. Perbedaan ini mampu mendorong terjadinya interaksi keruangan.

b. *Intervening Oppurtunity*

Intervening Oppurtunity merupakan kesempatan melakukan hubungan timbal balik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Dengan adanya campur tangan pihak ketiga (wilayah ketiga), maka dapat menjadi penghambat atau melemahkan interaksi antar dua wilayah.

c. *Transferability*.

Transferability merupakan kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi ataupun barang sangat bergantung dengan faktor jarak, biaya transportasi dan kelancaran prasarana transportasi. Jadi semakin mudah transferabilitas, maka akan semakin besar arus komoditas.

6. **Faktor-faktor Yang Menjadi Indikator Untuk Mengukur Kuat dan Lemahnya Interaksi Wilayah**

Pandapotan Nainggolan (2012) menyatakan bahwa, Pada perkembangannya variabel yang sering digunakan untuk mengetahui daya tarik atau kekuatan interaksi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk dan jarak kedua daerah tersebut. Pendapat ini

menjelaskan bahwa, jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam kaitannya dengan keterkaitan anatar-wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam perkembangan suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin besar juga pengaruh wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya sedangkan semakin sedikit jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin kecil pengaruh wilayah tersebut terhadap wilayah yang lain. Selain jumlah penduduk jarak antar-wilayah juga merupakan aspek penting dalam kaitannya dengan keterkaitan antar-wilayah.

a. Jumlah Penduduk

Menurut KBBI jumlah adalah banyaknya atau tentang bilangan yang dikumpulkan menjadi satu. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah. Jumlah penduduk sering diartikan juga dengan populasi penduduk. Menurut KBBI populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk atupun populasi penduduk sangat mempengaruhi interaksi spasial. Jumlah penduduk pada masing-masing wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata merupakan indikator dan faktor yang dapat mempengaruhi daya tarik interaksi spasial antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

b. Jarak Absolut

Jarak merupakan ruang yang memisahkan antara dua objek. Jarak ada 2 jenis yaitu: Jarak Absolut dan Jarak Relatif. Jarak absolut yaitu jarak yang sebenarnya berdasarkan pengukuran garis lurus di antara 2 lokasi. Dalam menentukan daya tarik interaksi spasial antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya jarak absolut dapat digunakan sebagai indikator serta faktor yang menentukan kuat dan tidaknya interaksi antara kedua wilayah tersebut.

7. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU No.26 tentang penataan ruang, 2007). Pusat-pusat permukiman dan jaringan

prasarana dan sarana dapat memiliki fungsi sebagai pendukung wilayah-wilayah disekitarnya sehingga dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pusat pertumbuhan dan juga pusat pelayanan. Struktur ruang dimaknai dengan kedudukan atau hierarkis wilayah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lembata secara spasial yang memiliki hubungan secara fungsional.

Menurut Rapermen Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam Pedoman Penyusunan RTRW Struktur ruang kabupaten diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat kegiatan strategis nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat kegiatan wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat kegiatan lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat pelayanan kawasan yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan.

f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar-desa.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Lucas soares dan dkk, 2016 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Disparitas dan Interaksi Spasial di Timor Leste*” berhasil mengukur hierarki wilayah Negara Timor Leste dengan menggunakan metode skelogram dan analisis gravitasi serta menentukan pengembangan pusat kegiatan wilayah di Timor Leste. Tujuan penelitian lucas dkk, adalah untuk menganalisis ketimpangan antar-wilayah di Negara Timor Leste dan menganalisis interaksi spasial serta merumuskan pusat kegiatan wilayah. Penelitian Lucas dkk menganalisis data secara kuantitatif dengan perhitungan skelogram dan gravitasi dan menampilkan hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel dan peta kemudian tabel dan peta tersebut di deskripsikan secara kualitatif.

Perbedaan penelitian lucas dkk dan penelitian ini terletak pada unit wilayah kajian. Lucas dkk mengambil pada tingkat wilayah Nasional yaitu Negara Timor Leste sedangkan penelitian ini mengambil unit wilayah Kabupaten. Lucas dkk, mengambil lokasi penelitian di Negara Timor Leste sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu terdapat perbedaan dalam cara pendekatan terhadap objek kajian. Lucas dkk, memandang objek kajian berangkat dari sudut pandang ilmu perencanaan desa dan wilayah sedangkan penelitian ini memandang objek kajian dengan sudut pandang ilmu geografi.

Lucas dkk, hanya mampu mendeskripsikan hasil tabel dan peta tapi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan geografis?. Penelitian ini tidak hanya mengukur hierarki pusat pertumbuhan dan daya tarik interaksi spasial melainkan juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan geografis.

Yarmin gulo, 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “*Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias*” berhasil mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Nias dengan menggunakan metode skelogram dan analisis gravitasi.

Penelitian Yarmin gulo bertujuan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah kecamatan dan mengaitkannya dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Nias. Hasil dari penelitian Yarmin gulo adalah hierarki wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Nias, Ranking interaksi spasial dan perbandingannya dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Nias.

Perbedaan penelitian Yarmin gulo dan penelitian ini terletak pada aspek lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lembata sedangkan penelitian Yarmin gulo di Kabupaten Nias. Penelitian memiliki tujuan menganalisis struktur ruang di Kabupaten Lembata sedangkan penelitian Yarmin gulo bertujuan mengidentifikasi pusat pertumbuhan dan mengkaitkannya dengan kebijakan tata ruang wilayah di kabupaten Nias. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dan menjadikan peta sebagai acuan analisisnya.

Tabel 1.5.2.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti		Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Lucas Soares, Ernan Rustiadi dan Sri Mulatsih		Analisis Disparitas dan Interaksi Spasial di Timor-Leste	1]. Mengkaji dan menganalisis ketimpangan (disparitas) pembangunan antar-wilayah di Timor-Leste. 2]. Mengkaji dan Menganalisis Keterkaitan dan interaksi spasial antar-distrik di Timor-Leste. 3]. merumuskan tentang perwilayahan pengembangan wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berbasis struktur spasial.	Metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder dengan teknik analisis skologram dan model gravitasi.	1]. Hierarki distrik berdasarkan hasil analisis skologram. 2]. Analisis gravitasi terhadap Kota Dili. 3]. Analisis pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), hinderland serta nilai indeks interaksi antar-distrik (NIIAD).
Yarman Gulo		Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias	1]. mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias. 2]. menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (growth centre) dan daerah sekitarnya (hinterland) kecamatan pendukung.	metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis skalogram dan analisis gravitasi.	1]. Hierarki pusat pertumbuhan tiap Kecamatan di Kabupaten Nias. 2]. Nilai Interaksi Wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Nias. 3]. Nilai interaksi wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland di Kabupaten Nias. 4]. Perbedaan pusat pertumbuhan hasil analisis dan kebijakan RTRW Kabupaten Nias.

Sumber:

Studi

Literatur

Penulis,

2017

1.6. Kerangka Penelitian

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsionalitas. Penggabungan wilayah berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional menghasilkan wilayah berdasarkan aspek perencanaan. Dalam merencanakan wilayah, aspek keruangan memegang peranan penting. Dinamika spasial yang terjadi pada wilayah disebabkan oleh elemen-elemen spasial yang terdapat di dalam ruang tersebut. Elemen-elemen spasial tersebut adalah elemen spasial yang bersifat dinamis. Elemen-elemen tersebut dapat berupa kegiatan ekonomi, kegiatan pelayanan dan jasa, pertumbuhan penduduk dan bahkan mobilitas penduduk. Dinamika spasial yang dinamis seperti ini membentuk hierarki wilayah atau struktur ruang wilayah yang memiliki jenjang. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah merupakan hasil dari proses dinamika spasial. Perbedaan ketersediaan fasilitas sosial di berbagai wilayah dalam satu kesatuan ruang menimbulkan ketergantungan antar-wilayah atau biasa disebut interpendensi wilayah. Ketergantungan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain menyebabkan disparitas atau ketimpangan pembangunan antar-wilayah. Ketergantungan antar-wilayah juga juga mengindikasikan adanya keterkaitan antar-wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Keterkaitan antar-wilayah ini dapat berupa kuat dan lemahnya daya tarik suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Wilayah yang memiliki daya tarik kuat akan memicu terjadinya interaksi antar- wilayah atau biasa disebut interaksi keruangan.

Studi ilmu geografi mengkaji fenomena-fenomena geosfer seperti ini dengan menggunakan pendekatan spasial dan berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait fenomena-fenomena keruangan. Tema analisis spasial yang paling tepat digunakan adalah tema analisis organisasi spasial dan analisis interaksi spasial. Skema gambaran kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.6.1.

1.7. Batasan Operasional

1. **Wilayah** adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun aktifitas sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya (Choirul Amin dan Muhammad Musiyam, 2017). Wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah administrasi Kabupaten Lembata.
2. **Ruang** merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Lembata.
3. **Fasilitas sosial** merupakan, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi: fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman umum (Permendagri No. 1, 1987). Fasilitas sosial dalam penelitian ini adalah seluruh fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan di Kabupaten Lembata yang terdata oleh Badan Pusat Statistik dan disortir berdasarkan Kecamatan.
4. **Hierarki Wilayah** dapat dimaknai dengan berbagai penjelasan berikut. Menurut KBBI hierarki adalah urutan atau tingkatan jenjang jabatan. Choirul Amin dan Muhammad Musiyam, 2017 menyatakan bahwa, wilayah adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun aktifitas sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Berdasarkan berbagai

penjelasan tentang hierarki dan wilayah dapat dimaknai bahwa, hierarki wilayah merupakan urutan dan jenjang kedudukan wilayah berdasarkan fungsi wilayah.

5. **Struktur Ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU No.26 tentang penataan ruang, 2007).
6. **Jumlah penduduk** dapat dimaknai dengan berbagai penjelasan berikut. Menurut KBBI jumlah adalah banyaknya atau tentang bilangan yang dikumpulkan menjadi satu. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah. Jumlah penduduk sering diartikan juga dengan populasi penduduk yang dinyatakan dengan satuan jiwa. Menurut KBBI populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata.
7. **Jarak absolut** merupakan jarak yang sebenarnya berdasarkan pengukuran garis lurus di antara 2 lokasi. Jarak absolut dalam penelitian ini adalah jarak absolut dari ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan di Kabupaten Lembata.
8. **Interaksi Wilayah** merupakan satu proses saling mempengaruhi antara dua hal (Yunus Hadi, 2010). Dalam penelitian ini interaksi spasial dapat menggambarkan daya tarik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dan saling mempengaruhi.

